



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 306 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan daerah sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, perlu adanya dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa sebagai wujud apresiasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah akan memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sehingga lebih meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerjanya dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif bagi Guru Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1342);

10. Peraturan .../3

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif bagi Guru Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua Tengah, rincian penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif bagi Guru Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara diberikan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/306 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKOLAH
LUAR BIASA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKOLAH LUAR BIASA

NO	NAMA/NIP	NUPTK	ASAL SEKOLAH	STATUS
A. Kabupaten Nabire				
1	Alfaris Johanes Topurtawi	9104011008720007	SLB Petra	Non PNS
2	Erens Wataha NIP196809162003121004	6248746650200013	SLB Petra	PNS
3	Juliati	5448762666300003	SLB Petra	Non PNS
4	Maria Agustina Trifona Sarfunin		SLB Petra	Non PNS
5	Noerhayati NIP197210132007012016	8345750652300053	SLB Petra	PNS
6	Sitti Hasniati NIP196802072006052001	5539746648300032	SLB Petra	PNS
7	Sri Yanti Buli	6250758659130103	SLB Petra	Non PNS
8	Titin Kusumajaya NIP197504252006052002	2757753654300022	SLB Petra	PNS
9	Umiyati NIP197105142006052001	7846749651300092	SLB Petra	Non PNS
10	Wilmawati	6856764665230232	SLB Petra	Non PNS
11	Yosafat Nawipa NIP.197106021996101001	3934749652200032	SLB Petra	PNS
12	Agustina Adii		SLB Kristus Sahabat Kita	Non PNS
13	Fransiskus Antal		SLB Kristus Sahabat Kita	Non PNS
14	Ahmad Caesar Raihan		SLB Matahari	Non PNS
15	Anastasia Gobay		SLB Matahari	Non PNS
16	Dewi Widiawati		SLB Matahari	Non PNS
17	Maria Yetiasaputri Kapitarauw, S.Sos.,.M.Si		SLB Matahari	Non PNS
18	Marthinus Harry Ivakdalam		SLB Matahari	Non PNS
19	Priani		SLB Matahari	Non PNS
20	Rohani Heremba		SLB Matahari	Non PNS
21	Yoke Ana Imbiri `		SLB Matahari	Non PNS
B. Kabupaten Dogiyai				
22	Agustina Butu	7146774675230173	SLB Sinar Kasih Dogiyai	Non PNS
23	Enias Anou NIP.198707122010041001	9044765666130163	SLB Sinar Kasih Dogiyai	PNS
24	Manase Tebai	-	SLB Sinar Kasih Dogiyai	Non PNS

25	Martina Douw	7462773674230112	SLB Sinar Kasih Dogiyai	Non PNS
26	Mesak Adii, S.Pd NIP198205202010041003	7753756657200032	SLB Sinar Kasih Dogiyai	PNS
27	Seniales Adii	2253772673130153	SLB Sinar Kasih Dogiyai	Non PNS
C. Kabupaten Mimika				
28	Anggelia Junita Seroy	-	SLB Negeri Mimika	Non PNS
29	Dwidiawati Saraung, S.Pd	0852767668230332	SLB Negeri Mimika	Non PNS
30	Eva Safitri	8957769670230222	SLB Negeri Mimika	Non PNS
31	Ignasius Materay	2462775676130143	SLB Negeri Mimika	Non PNS
32	Mince Retek Palinggi	0641759660230162	SLB Negeri Mimika	Non PNS
33	Murni Trine Mangero NIP.197302272015102001	1559751652220002	SLB Negeri Mimika	PNS
34	Relce Yohana Tiwow NIP.199606162022212010	4948774675230112	SLB Negeri Mimika	PNS
35	Riska Azis	1559774675230262	SLB Negeri Mimika	Non PNS
36	Sadriana Kamaruddin	4450769670230263	SLB Negeri Mimika	Non PNS
37	Sartika Patandianan	9448772673230113	SLB Negeri Mimika	Non PNS
38	Sukmah	9960770671130302	SLB Negeri Mimika	Non PNS
39	Sunardin NIP98209102010041002	2242760661110033	SLB Negeri Mimika	PNS
40	Syaiful. R NIP199203092022211007	7641770671130282	SLB Negeri Mimika	PNS
41	Davika Alexander		SLB Negeri Mimika	Non PNS
42	Muhammad Kostolani		SLB Negeri Mimika	Non PNS
43	Tisa Aprilia Batuwael		SLB Negeri Mimika	Non PNS
44	Veronika Ere		SLB Negeri Mimika	Non PNS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002